JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 1126-1132
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2323

Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

Daniar Seri Firdausi*, Diana Hertati
Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur[1]
*Correspondence email: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan. Namun dalam pelaksanaannya BPNT masih menuai banyak permasalahan dan kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini yakni sumber data primer yang mana didapatkan dari informan penelitian dan sumber data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni wawancara dengan metode purposive sampling, observasi secara langsung (*non participants*), serta dokumentasi dengan data terkait. Selain itu teknik analisis data yang digunakan yakni menggunakan analisis data interaktif. Serta uji keabsahan data yang digunakan yakni dalam penelitian kualitatif yaitu *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (standar ketergantungan), *confirmability* (kepastian). Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan BPNT di Desa Glagahan dalam pelaksanaannya dinilai belum optimal dan baik secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada aspek efisiensi, perataan, responsibilitas, dan ketepatan dinilai sudah baik dan tepat pelaksanaannya. Namun sayangnya pada efektivitas dinilai bahwa kurang tepatnya metode sosialisasi dan pemantauan yang belum dilakukan dengan baik. selain itu pada aspek fokus kecukupan dinilai BPNT hanya dapat memberikan manfaat secara terbatas karena bantuan yang diterima tidak cukup hingga periode bantuan selanjutnya.

Kata kunci: Bantuan pangan non tunai; evaluasi kebijakan; program bantuan.

Abstract. *Non-Cash Food Assistance (BPNT) is food assistance that is distributed non-cash from the government to Beneficiary Families (KPM) every month, through an electronic account mechanism that is used only to buy food at places that have collaborated with association banks. However, in its implementation, BPNT still reaps many problems and obstacles. This study aims to determine the Policy Evaluation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Glagahan Village, Perak District, Jombang Regency. The type of research used by the author in this study is descriptive qualitative. The data sources of this research are primary data sources which are obtained from research informants and secondary data sources obtained from books, journals, and documents related to this research. Then the data collection techniques used in this study were interviews with purposive sampling method, direct observation (non-participants), and documentation with related data. In addition, the data analysis technique used is using interactive data analysis. As well as the validity of the data used in qualitative research, namely credibility (degree of trust), Transferability (transferability), Dependability (standard dependence), Confirmability (certainty). The results of this study found that the implementation of BPNT in Glagahan Village in its implementation was considered not optimal and overall good. It can be seen that in the aspects of efficiency, leveling, responsibility, and accuracy, the implementation is considered good and appropriate. Unfortunately, the effectiveness is assessed that the method of socialization and monitoring has not been carried out properly. In addition, in the aspect of focus on adequacy, BPNT is considered to be able to only provide limited benefits because the assistance received is not sufficient until the next period of assistance.*

Keywords : *Non-cash food assistance; policy evaluation; assistance program.*

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam suatu negara pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mengubah setiap aspek kehidupan negara dari kondisi yang ada kearah yang lebih baik kedepannya. Salah satu pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah khususnya negara berkembang yakni masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah serius yang hingga kini sedang dialami negara kawasan Asia seperti Indonesia (Razali & Putri, 2020). Menurut Tlonaen et al. (2014) bahwa kemiskinan yakni kondisi saat seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Adanya kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, dan gizi (Tlonaen et al., 2014).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi penghambat dalam pembangunan, karena masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks sehingga suatu negara tidak mampu untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian. Hal ini berarti untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan

secara komprehensif dan terdapat dukungan dari berbagai pihak. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 16/02/Th. XXIV pada 15 Februari 2021 memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan. Dari Maret 2013 hingga September 2019 jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan hingga mencapai 24,79 juta penduduk miskin atau setara dengan 9,22%. Namun pada periode Maret 2020 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dan mencapai 26,42 juta jiwa atau setara dengan 9,78%. Yang kemudian mengalami kenaikan kembali pada periode September 2020 yang mana jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa atau setara dengan 10,19%. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin diatas tentunya disebabkan karena beberapa faktor yang salah satunya yakni adanya pandemi yang melanda Indonesia. Kenaikan jumlah penduduk telah menjadi isu yang semakin parah akibat adanya pandemi. Artinya dalam jangka pendek Covid-19 dapat memberi dampak berupa peningkatan kemiskinan yang dapat membalikkan sepuluh tahun kemajuan upaya penanggulangan kemiskinan (Sumber dalam Yandra et al., 2020).

Penduduk miskin di Indonesia tentunya tersebar di berbagai pulau. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang ada di wilayah Indonesia yang dihuni lebih dari 56% total penduduk di Indonesia (Ananda, 2021). Dengan demikian lebih dari setengah penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Dalam hal ini tidak hanya dihuni sebagian besar penduduk di Indonesia, melainkan Pulau Jawa juga merupakan pulau yang memiliki angka dan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Kemudian Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa. Yang dalam hal ini pada September 2020 Jawa Timur memiliki persentase penduduk miskin sebanyak 11,46% melebihi persentase nasional yakni sebesar 10,19%. Mengingat angka persentase penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi dan bahkan beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan persentase penduduk miskin, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat berbagai program dalam mengurangi angka persentase penduduk miskin tersebut. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keaggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

BPNT merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan Bank Negara (Julianto, 2020). Penyelenggaraan Program BPNT memiliki beberapa manfaat yaitu: (1) meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan; (2) meningkatnya transaksi yang dilakukan secara non tunai; (3) meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; (4) meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan (5) meningkatnya kondisi ekonomi di daerah, terutama pada usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan (Tan & Epriadi, 2021). Mengingat program BPNT merupakan program dari pemerintah pusat serta melihat angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan, sehingga Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah sasaran diterapkannya program tersebut. Pelaksanaan program BPNT dilakukan secara bertahap terhadap komoditi tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan potensi lokal daerah seperti daging ayam.

Desa Glagahan Kecamatan Perak merupakan salah satu wilayah pedesaan yang berada di Kabupaten Jombang dengan total penerima BPNT yakni sebanyak 212 KPM. Mengingat jumlah KPM BPNT yang cukup banyak, hal ini tentunya perlu perhatian lebih dalam implementasi program BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat. Sehingga bantuan tersebut sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Namun dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada, hal ini dapat dilihat berdasarkan kendala-kendala dalam pencapaian tujuannya. Dalam implementasi progam BPNT di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Seperti permasalahan yang dialami 13 KPM BPNT terkait penggantian komoditas program BPNT. Permasalahan juga terjadi pada kualitas salah satu komoditas yang diberikan kepada KPM BPNT dimana ayam yang diberikan belum sepenuhnya layak konsumsi tedapat 25 KPM menerima ayam busuk. Kemudian juga terdapat agen yang tidak memiliki izin menyalurkan BPNT. Selain itu dari data Dinas Sosial Kabupaten Jombang, pada bulan Agustus 2020 kurang lebih terdapat sekitar 840 orang KPM BPNT yang mengalami masalah pada kartu keluarga sejahteranya. Diantarannya saldo kosong, kartu baru atau instan, KKS terblokir dari total 97.186 orang KPM BPNT di Kabupaten Jombang. Terdapat

permasalahan juga pada data KPM BPNT yang dinilai banyak data ganda. Masih terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda, namun disisi lain juga terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam KPM BPNT merasa berhak mendapatkan bantuan tersebut (Yunus, 2019).

Setelah melihat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam imlementasi program BPNT, maka perlu dilihat evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kurniawan et al. (2021) bahwa suatu kebijakan program yang telah dilaksanakan haruslah diukur melalui evaluasi agar hasil yang dicapai diketahui, apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau hasil tersebut jauh menyimpang dari yang diharapkan. Selain itu dengan adanya evaluasi dapat memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak melakukan kesalahan yang sama (Razali & Putri, 2020). Evaluasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila dalam memahaminnya menggunakan suatu kerangka pemikiran tertentu. Yunus (2019) menemukan bahwa BPNT memiliki beberapa faktor penentu sikap yang kurang berhasil dalam implementasi program tersebut. Sedangkan Julianto (2020) menyatakan bahwa program BPNT dalam penyalurannya telah tepat sasaran dan tepat waktu. Namun Kawung et al. (2020) mengatakan bahwa implikasinya tidak sampai dengan pengetahuan masyarakat mengenai siapa saja yang menjadi pelaksana dan mekanisme program BPNT, namun yang berjalan secara keseluruhan hanya sumber daya finansial atau dana program BPNT yang di tetapkan oleh pemerintah pusat atau kementerian sosial. Selain itu Hotimah & Koesbandrijo (2019) mengemukakan bahwa di masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai ketentuan BPNT sehingga masyarakat memiliki pemikiran kalau pembagian bantuan tersebut tidak diambil pada saat waktu yang sudah ditentukan akan habis atau jatahnya akan hilang. Kemudian Mulyadi (2019) secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran BPNT tidak sesuai dengan aturan. Ditambahkan Wiwit et al. (2020) bahwa dalam penyaluran BPNT terdapat faktor penghambat yaitu kapasitas sumber daya manusia dan waktu. Sedangkan pada penelitian ini secara khusus akan meneliti dalam kerangka pemikirian Dunn (2003) yaitu meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responbilitas, dan ketepatan untuk mengisi celah penelitian yang belum ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang

METODE

Jenis penelitian ini adalah tergolong penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Menurut Hardani et al. (2020) penelitian deskriptif kualitatif adalah disebut juga penelitian deskriptif naturalistik. Disebut deskriptif naturalistik karena bersifat wajar sebagaimana adanya di lapangan. Kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan Dunn (2003) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsibilitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Anggito & Setiawan (2018) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Menurut Nugrahani (2014) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maka dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan kepada informan penelitian secara terstruktur dengan pertanyaan pada pedoman wawancara, sehingga mempermudah peneliti membuat rangkuman yang lebih sistematis dari hasil wawancara tersebut.

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2017) teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistemtis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan alam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari hasil pengamatan, hasil wawancara, beserta dokumentasi foto, maupun memperhatikan arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian, sebelum menarik kesimpulan maupun setelah kesimpulan yang didapat perlu lagi adanya pengecekan kembali sampai mendapatkan sebuah kesimpulan akhir. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak terkait BPNT yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jombang, TKSK Kecamatan Perak. Agen Penyalur di Desa Glagahan serta pada masyarakat glagahan sebagai sasaran penerima bantuan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program BPNT, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teori William N. Dunn. Berikut secara rinci dari setiap kriteria evaluasi menurut Dunn dikutip Nugroho (2018)

Efektivitas

Efektivitas merupakan hal yang berkaitan dengan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan memberikan fokus pada tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan merupakan bentuk penyelesaian masalah-masalah publik yang berada dilingkungan masyarakat dapat teratasi dengan maksimal. Efektivitas program BPNT nantinya diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan administrasi, dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam melihat tingkat keefektifan dari BPNT di Desa Glagahan terdapat 4 sasaran kajian yang digunakan yakni menurut Maijun & Utama (2013) sebagai dasar pengetahuan apakah program tersebut sudah berjalan seperti yang diharapkan yakni ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan yaitu program BPNT cukup tepat sasaran dalam membantu mereka dalam meringankan beban hidup meskipun tidak memberikan dampak yang sangat besar serta bantuan yang diberikan telah membantu KPM memenuhi gizi dengan seimbang. Selain itu juga adanya pemantauan oleh pemerintah yang terlibat terkait program BPNT ini, namun kurangnya pengawasan mengenai kualitas bantuan yang diberikan sehingga terkadang bantuan yang diberikan kualitasnya dibawah standarnya. Bahkan untuk sosialisasi program juga mengenai metode yang diberikan masih kurang menyeluruh ke masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai program BPNT. Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa efektivitas program BPNT masih belum sesuai dengan teori Damanik & Marom (2016) mengenai pemenuhan kriteria efektivitas.

Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil dari yang diinginkan. Fokus dari kriteria ini adalah banyaknya usaha yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan program BPNT meliputi sumber daya yang digunakan baik alokasi tenaga (SDM), estimasi waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Untuk melihat tingkat kefisiensian dari BPNT di Desa Glagahan terdapat 2 (dua) sasaran kajian yang digunakan yakni menurut Rusydiana (2018) ada dua hal yang menjadi sasaran kajian yakni efisiensi sumber daya dan efisiensi waktu. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan yaitu program BPNT cukup banyak menggunakan SDM yang diperlukan dalam pemantauan dan penyaluran bantuan mulai dari Dinas Sosial, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Jombang, Pendamping Sosial dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa dan Agen penyalur BPNT. Penyaluran bantuan sudah tepat waktu bahkan beberapa kali penyaluran bantuan digabung dalam satu waktu diawal. Selain itu waktu pengambilan bantuan juga tidak membutuhkan waktu yang lama karena terdapat beberapa pegawai dengan melaksanakan tugas masing-masing. Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa efisiensi program BPNT sudah sesuai dengan teori dari Rusydiana dikutip Abdiana (2020) yaitu terpenuhinya SDM dan sedikit waktu yang diperlukan dalam program ini.

Kecukupan

Fokus kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Kriteria ini lebih mempersoalkan kecukupan hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan atau seberapa jauh pencapaian tujuan yang sudah dirasakan dalam menjawab persoalan yang dialami masyarakat miskin. Untuk melihat tingkat kecukupan dari BPNT di Desa Glagahan dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Damanik & Marom (2016) yakni program BPNT memecahkan permasalahan masyarakat akibat kemiskinan dan ketimpangan pangan serta perubahan sikap, perilaku dan pola pikir masyarakat setelah adanya BPNT. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan yaitu program BPNT dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima. Namun hal tersebut hanya memberikan manfaat terbatas karena bantuan yang diterima tidak cukup sampai waktu penyaluran bulan berikutnya yakni bantuan yang diberikan hanya mampu digunakan dalam memenuhi kebutuhan pangan selama 1 sampai 2 minggu. Dengan kata lain program ini belum cukup memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu, program BPNT ini dapat mengubah sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat tersebut. Hal ini terjadi karena mereka dapat lebih bersyukur dan bersikap terbuka atas bantuan yang telah ada meskipun dengan jumlah bantuan yang terbatas. Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kecukupan program BPNT masih belum sesuai dengan teori dari Damanik & Marom (2016) yaitu belum terpecahkannya permasalahan masyarakat mengenai banyaknya pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat.

Perataan

Perataan berkenaan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Kriteria perataan dalam

kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik. Dalam hal ini yaitu untuk menganalisis pendistribusian secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat BPNT. Untuk melihat tingkat perataan dari BPNT di Desa Glagahan dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Duri & Rahmah (2020) yakni pemerataan penddistribusian BPNT dan berkurangnya masyarakat miskin. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan yaitu bantuan yang ada sudah dapat dikatakan merata ke masyarakat miskin, bahkan terdapat beberapa masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan pengunduran diri. Hal ini dapat terjadi karena selalu dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai kelayakan penerima bantuan. Sehingga selalu ada *update* data mengenai penerima BPNT. Program BPNT juga dapat dikatakan merata apabila dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin, program BPNT tidak bisa mengetahui apakah program ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin atau tidak. Karena penurunan jumlah penduduk miskin tidak hanya akibat dari pemberian BPNT saja melainkan juga ada bantuan lain yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu dari data yang ada Tahun 2020 angka penduduk miskin mengalami peningkatan karena pandemi telah melanda seluruh wilayah di Indonesia. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perataan program BPNT masih belum sesuai dengan teori Duri & Rahmah (2020) yaitu pendistribusian sudah merata namun belum diketahui berkurang atau bertambahnya jumlah masyarakat miskin

Responsibilitas

Responsibilitas berkenaan dengan apakah kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Kriteria ini lebih kepada aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu atau tidak. Untuk melihat tingkat perataan dari BPNT di Desa Glagahan dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Akibu (2014) yakni tanggapan kelompok sasaran mengenai pemenuhan BPNT terhadap kebutuhannya dan kelompok rentan dan terdampak mendapatkan preferensi (prioritas) program BPNT. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan menjelaskan bahwa masyarakat cukup merasa puas dengan bantuan yang ada. Pada dasarnya program BPNT mampu membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat merasa cukup terbantu meskipun bantuan yang ada tidak dapat bertahan hingga penerimaan bantuan di bulan berikutnya. Selain itu juga terdapat prioritas kepada kelompok rentan khususnya pada para penerima PKH yang telah terdaftar dalam DTKS. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa responsibilitas program BPNT telah sesuai dengan teori Akibu (2014) yaitu masyarakat masih sudah puas dan terdapat prioritas penerima BPNT.

Ketepatan

Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yaitu apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran. Untuk melihat tingkat perataan dari BPNT di Desa Glagahan dapat dilihat dengan sasaran kajian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menurut Lejiu (2014) yakni hal yang dicapai bermanfaat dan bernilai serta membandingkan mekanisme di peraturan serta di realita. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis temukan di lapangan menjelaskan bahwa program BPNT bermanfaat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka meskipun bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan pangannya hingga bulan selanjutnya. Selain itu juga program BPNT sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu saling berkoordinasi atau bekerjasama dengan lembaga terkait. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa responsibilitas program BPNT sudah sesuai dengan teori Lejiu (2014:524) yaitu hasil dari BPNT bermanfaat dan telah sesuainya isi peraturan yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan

Penelitian ini sama dengan penelitian Yunus (2019) menemukan bahwa BPNT memiliki beberapa faktor penentu sikap yang kurang berhasil dalam implementasi program tersebut. Kemudian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2020) menyatakan bahwa program BPNT dalam penyalurannya telah tepat sasaran dan tepat waktu. Serta sejalan dengan Hotimah & Koesbandrijo (2019) mengemukakan bahwa di masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai ketentuan BPNT sehingga masyarakat memiliki pemikiran kalau pembagian bantuan tersebut tidak diambil pada saat waktu yang sudah ditentukan akan habis atau jatahnya akan hilang. Karena BPNT di Desa Glagahan dalam pelaksanaannya sosialisasi belum dilakukan secara keseluruhan yang mana mengakibatkan banyak penerima bantuan yang kurang mengetahui mengenai BPNT.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BPNT di Desa Glagahan dalam pelaksanaannya dinilai belum optimal dan baik secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada aspek

efisiensi, perataan, responsibilitas, dan ketepatan dinilai sudah baik dan tepat pelaksanaannya. Namun sayangnya pada efektivitas dinilai bahwa kurang tepatnya metode sosialisasi dan pemantauan yang belum dilakukan dengan baik. selain itu pada aspek fokus kecukupan dinilai BPNT hanya dapat memberikan manfaat secara terbatas karena bantuan yang diterima tidak cukup hingga periode bantuan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdiana Ilo, W. D. F. Z. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota. *Jurnal Manajemen Kompeten*, *2*(2), 66–74. https://doi.org/10.51877/mnjm.v2i2.120

Akibu, R. S. 2014. Evaluasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA Negeri 1 Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *E-Jurnal Katalogis*, *2*(1), 8–14.

Ananda, C. F. 2021. *Jawa-Sentris dan Pertumbuhan Ekonomi Baru*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. https://feb.ub.ac.id/id/jawa-sentris-dan-pertumbuhan-ekonomi-baru.html

Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

Berita Resmi Statistik Nomor 16/02/Th. XXIV.

Damanik, Y. T., & Marom, A. 2016. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Public Policy and Management Review*, *5*(3), 221–232.

Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadja Mada University Press.

Duri, R., & Rahmah, M. 2020. Evaluasi Pemekaran Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *3*(1), 43–52.

Hardani, Andriani, H., Auliya, N. H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue March). CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Hotimah, S., & Koesbandrijo, B. 2019. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *5*(2).

Julianto, P. 2020. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam : The Leader's Writing*, *1*(1).

Kawung, A., Lumolos, J., & Sampe, S. 2020. Evalusi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, *4*(4).

Kurniawan, A., Hakim, L., & Ramdani, R. 2021. Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. *Government and Political Studies*, *4*(1), 40–51.

Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. 2014. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reformeform*, *2*(4), 515–526.

Maijun, & Utama, S. J. 2013. *Efektivitas Pelaksanaan Program Urban Farming di Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya* (pp. 1–12).

Mulyadi, A. 2019. Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*.

Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.

Nugroho, R. 2018. *Public Policy* (Y. Masda (ed.); 6th ed.). PT Elex Media Komputindo. https://doi.org/718061277

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Razali, M. T., & Putri, M. D. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018. *Jurnal Kemunting*, *1*(1), 58–134.

Rusydiana, A. S. 2018. Indeks Malmquist untuk Pengukuran Efisiensi dan Produktivitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *26*(1), 47–58.

Sugiyono. 2017. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tan, T. J., & Epriadi, D. 2021. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batam. *Jurnal Administrasi*, *3*(1).

Wiwit, Sulistyaningsih, T., & Kamil, M. 2020. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *13*(1).

Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T. 2020. Evaluation of Family Hope Program (PKH) in Rumbai District, Pekanbaru City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *19*(2), 168–176. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.119

Yudid B S Tlonaen, Hardianto, W. T., & Diahloka, C. 2014. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *3*(1), 29–37.

Yunus, E. Y. 2019. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*, *9*(2).